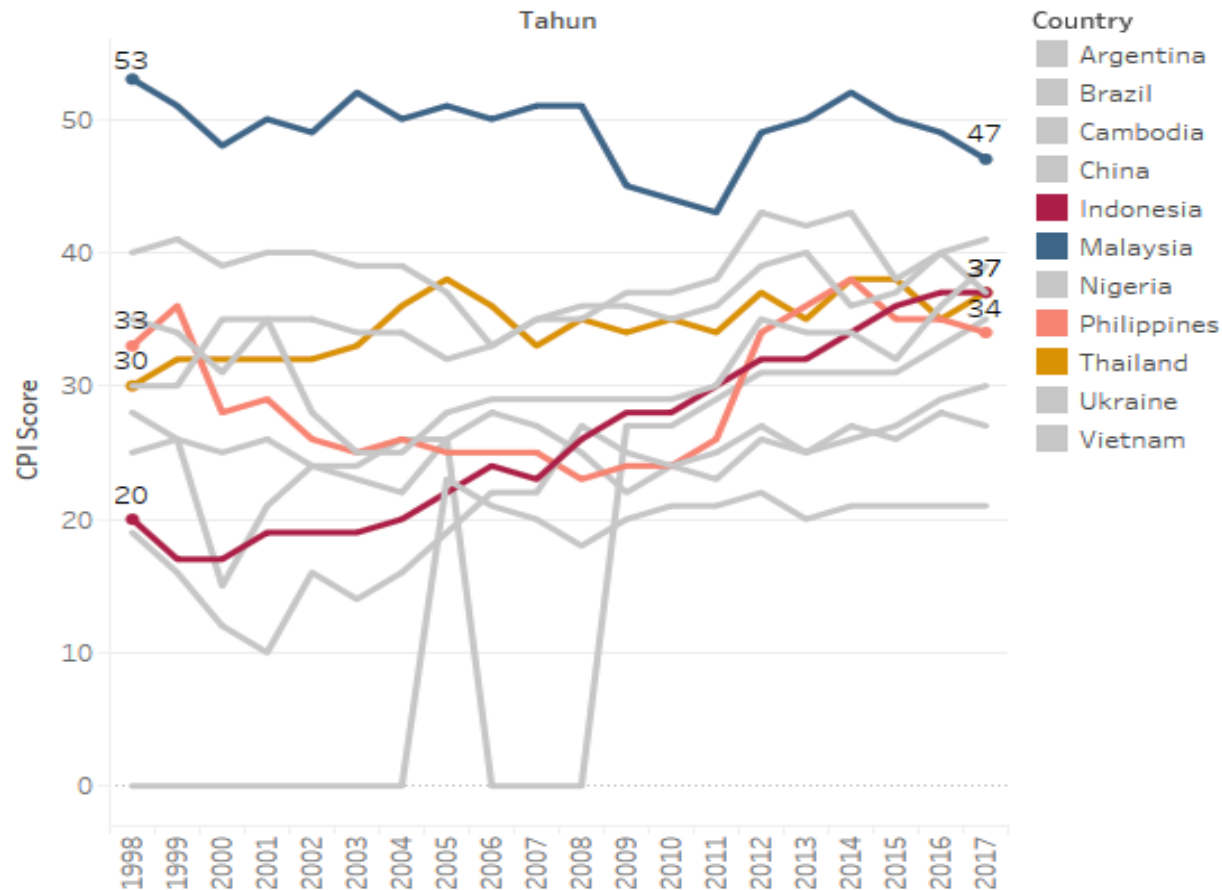


HAKORRDIA 2018

Hari Anti Korupsi Sedunia

HOTEL BIDADARA
JAKARTA, 4 -5 DESEMBER 2018

CPI | CORRUPTION PERCEPTION INDEX



PENINGKATAN 1998-2017:

Indonesia : 17
 Vietnam : 10
 Argentina : 9
 Nigeria : 8
 Thailand : 7
 China : 6
 Ukraine : 2
 Philippine : 1
 Cambodia : -2 (2005-2017)
 Brazil : -3
 Malaysia : -6

Source: <https://transparency.org/research/cpi>

37

Economist Intelligence Unit/EIU
(Country Risk Rating):

41

IMD world Competitiveness:

35

Global Insight (Country Risk Rating)

- Eksistensi Suap dan Korupsi

37

Bertlesmann Transformation Index:

World Justice Project: 20

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (*rule of law*)
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutif, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

CPI SCORE
37

PERC: 32

- Persepsi korupsi sektor publik :
 - a. Pimpinan politik nasional dan lokal
 - b. PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

50

World Economic Forum – Executive Opinion Survey:

30

Varities Democracy Project (baru di 2017)

- Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara : electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual

50

International Country Risk Guide:

JAGA Versi 5.0

COMING SOON



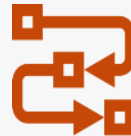
Akses informasi serba-serbi pelayanan publik dan praktik terbaik untuk mencegah korupsi



Tidak menggantikan saluran pengaduan yang telah ada



Peningkatan proses bisnis dan sistem penunjang platform



User centric – penggunaan *data analytics* untuk mendapatkan pengalaman pengguna yang lebih baik



Data lebih banyak dan *up to date*



Fitur diskusi – masyarakat menemukan dan menyebarkan cara mencegah korupsi versi mereka



JAGA PENDIDIKAN



JAGA KESEHATAN



JAGA DESA



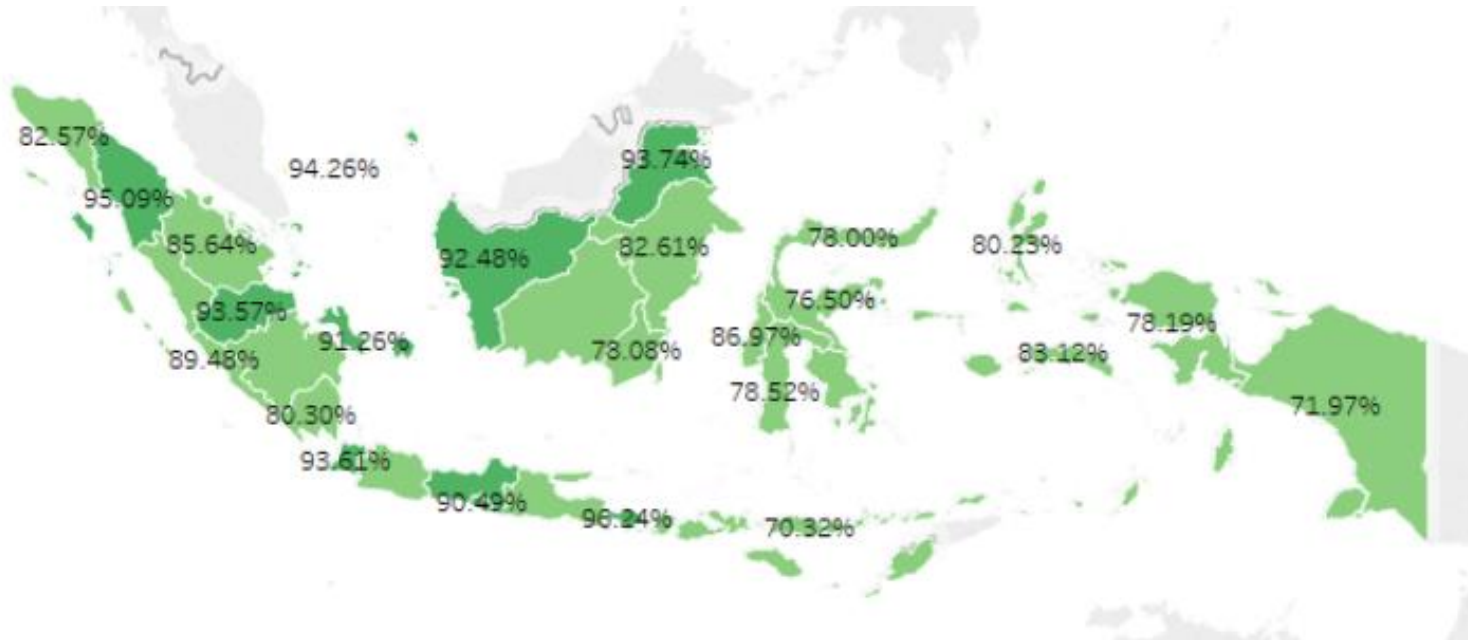
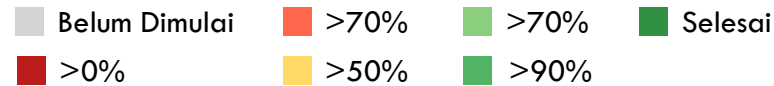
JAGA PERIZINAN

PROGRES KEGIATAN IMPLEMENTASI e-LHKPN

83,25%



LEGENDA WARNA:



Progress Kegiatan
Implementasi e-LHKPN **83.25%**
Pada **1,300** Instansi

Pusat	77.33%	→ 238 Instansi
Daerah Tingkat I	86.90%	→ 107 Instansi
Daerah Tingkat II	83.63%	→ 955 Instansi

BUMN/BUMD	77.41%	→ 173 Instansi
Yudikatif	77.46%	→ 2 Instansi
Eksekutif	89.05%	→ 642 Instansi
Legislatif	72.94%	→ 483 Instansi

*Berdasarkan penarikan data mcp kegiatan implementasi per Tanggal : 15/11/2018

REFORMASI BIROKRASI



RIGHT-SIZING

Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran



REMUNERASI PNS

Termasuk Kepala Daerah



REFORMASI BIROKRASI

Terlaksananya Penataan Kelembagaan yang Ideal 2019-2024

Penanggung Jawab:



Kemenpan RB



Kemendagri

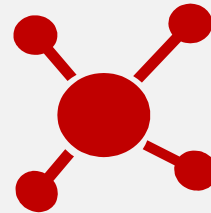
GAP ATURAN INDONESIA TERHADAP UNCAC

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006



Sektor Swasta

Undang-undang dan regulasi
Anti Korupsi untuk *private*
sector



Perdagangan Pengaruh

Trading in influence



Memperkaya Diri Secara Tidak Sah

Illicit enrichment



Pengembalian Aset

Asset Recovery

KNPK 2018

KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI



“MEWUJUDKAN SISTEM INTEGRITAS
PARTAI POLITIK DI INDONESIA (SIPP)”



PENANDATANGANAN KOMITMEN PARTAI
POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN SIPP

TERIMA KASIH